

PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJARBARU

Muhammad Saktiyono Pratama . Abdul Hamid, . Sudiyono

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Banjarmasin, 19810155

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Banjarmasin, NIDN1118097201

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Banjarmasin, NIDK8834301019

Email : Muhammadsaktiyonoprata@gmail.com

ABSTRAK

Muhammad Saktiyono Pratama. 19810155. 2023. PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJARBARU. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I : Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., dan Pembimbing II : Dr. Sudiyono S.H., M.H.

Kata Kunci ; Pencurian, Reserse Kriminal, Tindak Pidana

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya, sehingga peranan unit reserse kriminal sangat diperlukan, untuk mengamankan dan mencegah tindak pidana pencurian.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana peranan Unit Reserse Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banjarbaru dalam mengungkap tindak pidana pencurian dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polres Banjarbaru dalam pengungkapan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersikap deskriptif.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa; Pertama, Peranan Unit Reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Banjarbaru, Unit Reserse Kriminal Polres Banjarbaru melakukan peran dengan cara menerima aduan dari korban, laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mencari informasi di sekitar TKP, mencari bukti-bukti yang ada di TKP dan telah berdasar atas KUHP. Kedua, Kendala yang dialami dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Banjarbaru adalah terkait dengan sarana dan fasilitas yakni terkait dengan CCTV dan juga masyarakatnya yang menjadi saksi maupun pelaku. Adapun solusi dan upaya institusi kepolisian Daerah Kalsel telah dilakukan patroli unit sabhara dengan sarannya dan sesuai

dengan mekanisme kerja lembaganya. Selain itu, budaya penyuluhan kesekolah juga telah dilaksanakan dan peraturan juga telah dilaksanakan seefektif mungkin untuk secara simultan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata oleh pihak Polres Banjarbaru.

ABSTRACT

Muhammad Saktiyono Primary. 19810155. 2023. THE ROLE OF THE CRIMINAL RESERVE UNIT IN REVEALING THE CRIME OF THEFT IN THE JURISDICTION OF THE BANJARBARU POLRES. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I : Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., and Advisor II : Dr. Sudiyono S.H., M.H.

Keywords; Theft, Criminal Investigation, Crime

Theft is one type of crime against human property regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP) and is an endless problem, so the role of the criminal investigation unit is very necessary, to secure and prevent theft.

This study focused on knowing how the role of the Criminal Investigation Unit in the Banjarbaru Police Jurisdiction in uncovering theft crimes and knowing what obstacles are faced by the Banjarbaru Police Criminal Investigation Unit in disclosing theft crimes.

This research is an empirical legal research where this research conducts empirical legal research examining laws that are conceptualized as actual behavior, as social symptoms that are unwritten, experienced by everyone in community life relationships. This study was descriptive.

The results of this thesis research show that; First, the role of the Investigation Unit in uncovering cases of theft in the jurisdiction of Banjarbaru Police Station, the Banjarbaru Police Criminal Investigation Unit plays a role by receiving complaints from victims, reports from the community, investigation, investigation, processing crime scenes (crime scenes), searching for information around crime scenes, looking for evidence at crime scenes and based on the Criminal Procedure Code. Second, the obstacles experienced in uncovering cases of theft with aggravation in the jurisdiction of the Banjarbaru Police Station are related to facilities and facilities, namely related to CCTV and also the community who are witnesses and perpetrators. The solutions and efforts of the South Kalimantan Regional police institution have been carried out patrolling the sabhara unit with its advice and in accordance with the working mechanism of the institution. In addition, the school counseling culture has also been implemented and regulations have also been implemented as effectively as possible so that simultaneously the process of law enforcement and justice can be realized in reality by the Banjarbaru Police Station.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, (1999), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Djoni Sumardi Gozali, (2021), *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Uii Press.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Effendy, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah*, Universitas Surabaya, Liliyanti Selvia Sadipun.
- Lamintang, (1990) *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang dan Theo Lamintang, (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Supriadi, (2010), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Arif, Muhammad, (2021), "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* (Volume 13. Nomor 1).
- Hia, Yulna Dewita, (2013), "Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran", *Economica*, (Volume 1. Nomor 2).
- Septaria, Renny, and Siti Mutmainnah Zulfaridatulyaqin, (2021), "Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan Pendekatan Ekonomi". *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* (Volume 4. Nomor 1).
- Thalis Noor Cahyadi, (2013), "Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, (Volume 2, Nomor 1).

Website

- Koran Banjar Net, "Tak Berkutik, Pemuda Ini Diamankan Kasus Pencurian", dapat diakses online pada <https://koranbanjar.net/tak-berkutik-pemuda-ini-diamankan-kasus-pencurian>, tanggal 09 Mei 2023.
- Tribatanews.kepri.polri.go.id, "Tugas Pokok Reserse Polri", dapat diakses online pada <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim>, tanggal 5 juli 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.